

PEMANFAATAN INTERNET DESA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA CIBOGO KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT

Noneng Sumiaty¹

¹Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Penelitian Komunikasi Dan Informatika Bandung (BPSDMP) Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI
Jl. Pajajaran No. 88, Kota Bandung-Jawa barat, Indonesia 40173
none001@kominfo.go.id

ABSTRAK

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, begitu juga dengan pemerintah di tingkat desa seperti Desa Cibogo memanfaatkan internet desa bagi pengembangan desa baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan, seperti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa layanan publik di Desa Cibogo sudah bagus, setiap kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan cepat. Desa ini sudah menerapkan pelayanan secara *online* namun belum sepenuhnya, masih ada sebagian layanan secara *offline*. Infrastruktur internet di kantor desa sudah terhubung dengan adanya *command centre*. Setiap OPD sudah memiliki akses internet. Sudah tersedia internet gratis di 13 RW yang ada di Desa Cibogo, masyarakat bebas menggunakannya. Beberapa orang aparat desa telah mengikuti diklat TIK, yang lainnya belajar secara otodidak. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai TIK kepada masyarakat, agar Sumber Daya Manusia Desa Cibogo melek internet sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kata kunci: Pemanfaatan, internet, pelayanan publik, dan desa.

THE VILLAGE INTERNET UTILIZATION AS PUBLIC SERVICES IN CIBOGO VILLAGE KECAMATAN LEMBANG BANDUNG BARAT REGENCY

ABSTRACT

One of the functions of the government is to provide services to the community, as well as government at the village level such as Cibogo Village utilizing village internet for village development both in public services and regional development, such as infrastructure, information technology, communication, and transportation. The method used in this study is the method of collecting data through the study of literature / literature. Literature sources obtained from: journals, books, internet and research results. The results of the study stated that public services in Cibogo Village are already good, every public interest can be served quickly. This village has implemented online services but not fully, there are still some offline services. Internet infrastructure in the village office is already connected with the command center. Every OPD already has internet access. Free internet is available on 13 RWs in Cibogo Village, people are free to use it. Some village officials have participated in ICT training, others have taught themselves. It is expected that there will be special training on ICTs for the community, so that the Human Resources of Cibogo Village is internet literate so that it can improve the welfare of its people.

Keywords: *Utilization, internet, public services, and villages.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merambah semua sektor, termasuk penyelenggaraan pemerintahan. Kota/kabupaten sampai wilayah administratif termasuk desa menjadi perhatian pembangunan. Optimalisasi TIK menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desa sebagai bagian wilayah yang menyokong pembangunan nasional selayaknya diarahkan dapat memanfaatkan TIK untuk memberikan manfaat bagi desa.

Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 yaitu UU tentang Desa menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari pengaturan tentang Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa (pasal 4. f). Konsep pengembangan desa yang memanfaatkan desa banyak diinisiasi oleh wilayah-wilayah di Indonesia, termasuk didalamnya di Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat merupakan kabupaten yang sudah memiliki inisiasi untuk membangun desa dengan memanfaatkan teknologi, dengan membangun *smart village*. *Smart Village* merupakan konsep sederhana dari *smart city*, yang bertujuan untuk mewujudkan desa mandiri yang berkelanjutan, dapat menjadikan desa lebih menarik untuk ditempati, dikunjungi

maupun untuk dijadikan sasaran investasi. Dengan jumlah desa yang cukup banyak (165) desa yang tersebar ke 16 kecamatan tampaknya konsep *smart village* sangat cocok diterapkan di kabupaten tersebut (Fuadi, 2019).

Desa Digital bertujuan untuk menyediakan akses internet di desa yang sebelumnya tidak memiliki koneksi internet sama sekali. Lebih utama, program ini untuk meningkatkan literasi masyarakat di berbagai bidang seperti pendidikan dengan memanfaatkan teknologi digital. “Selain penyertaan infrastruktur dan peningkatan literasi digital, harapannya setiap desa juga mampu memanfaatkan kanal informasi dan komunikasi, seperti Instagram dan Whatsapp Group untuk berkomunikasi dengan perangkat desa dan mempromosikan potensi desa,” ujar Gubernur Ridwan Kamil (Kominfo.go.id, 2020).

Sejumlah inovasi perbaikan pelayanan publik di desa berkontribusi pada pencapaian derajat kesejahteraan masyarakat. Pelayanan administrasi desa pun sampai sekarang turut berkontribusi pada pelayanan administrasi kependudukan nasional. Namun kenyataannya kondisi pelayanan publik di antar desa beragam, ada yang sudah baik, namun tidak sedikit yang

masih memperhatikan. Padahal UU Desa yang mengedepankan *asas rekognisi dan subsidiaritas* (desa memiliki wewenang untuk mengurus potensi dan asetnya sendiri untuk mencapai kesejahteraannya) sudah semestinya memerankan masyarakat dalam berpartisipasi memperbaiki pelayanan publik desa.

Pengembangan desa di Kabupaten Bandung Barat diarahkan oleh pemerintah Provinsi melalui Desa Digital atau *Digital Village*. Konsep ini merujuk pada konsep tentang pengembangan desa dengan memanfaatkan teknologi digital baik dalam pelayanan publik maupun pengembangan kawasan, seperti infrastruktur, teknologi informasi, komunikasi, transportasi, zonasi, irigasi/drainase dan energi. Dengan desa digital diharapkan mampu untuk menurunkan biaya (*cost reduction*) dan meningkatkan pelayanan publik serta taraf hidup masyarakat desa. Teknologi sendiri hanya sebuah alat untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kinerja atau layanan, dengan menggunakan teknologi, desa akan lebih maju dan mandiri. Karena desa tidak lagi tergantung pada wilayah di atasnya (kota/kabupaten) bahkan pusat (Anonim, 2019).

Saat ini, inisiasi dan rencana implementasi TIK sedang berjalan di wilayah-wilayah desa di kabupaten

Bandung Barat. Bagaimana kemudian desa-desa di Kabupaten Bandung Barat dalam menyiapkan dirinya memanfaatkan TIK, diantaranya internet dapat menjadi sumber informasi bagi pengambil kebijakan dalam mendorong optimalisasi TIK. Seperti pada pelayanan administrasi kewarganegaraan misalnya pengantar akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kematian, dan Pembuatan akta jual beli tanah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pemanfaatan Internet Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Fokus penelitian adalah bagaimana pemanfaatan internet desa dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat?

Tujuan kajian adalah ingin menganalisis pemanfaatan internet desa dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat. Kegunaan kajian ini diharapkan memberi masukan kepada (Dirjen Aptika) Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai pemanfaatan internet desa dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat di Desa Cibogo Kecamatan

Lembang Kabupaten Bandung Barat
 Provinsi Jawa Barat.

Gambaran Umum Desa Cibogo

Cibogo adalah desa di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia. Nama Cibogo diambil dari kata ci dan bogo, ci atau cai adalah Bahasa Sunda yang berarti air atau sungai, sedangkan bogo juga diambil dari Bahasa Sunda yang berarti ikan gabus, dinamakan cibogo karena populasi ikan gabus disana sangat banyak akan tetapi seiring berjalannya waktu populasi ikan gabus disana menjadi sangat sedikit.

Luas wilayah	1.95 Km ²
Jumlah penduduk	10.129 Jiwa
Kepadatan penduduk	5.000 org per km ²

Desa Cibogo terdapat 3 kampung yang menempati wilayah Desa Cibogo, yaitu Kampung Cilumber, Kampung Ciburial, dan Kampung Cibogo, terdapat 4 sekolah dasar, dan 1 SMK ([wikipedia](https://www.wikipedia.org). 2020).

Desa Cibogo merupakan desa yang masyarakat umumnya bekerja di bidang pertanian, sayuran dan perdagangan. Bandar sayuran sudah menjual secara online. Di desa tersebut ada sektor pariwisata, yaitu antara lain memetik sendiri stoberi, ada industri rajutan, dan hasil olahan makanan seperti kripik susu,

kripik singkong dan lain-lain. Sekarang mereka para pengrajin industri rumah tangga, makanan ringan atau hasil karya lainnya; sudah mulai menjual secara *online*. Daya Tarik Desa Cibogo merupakan desa yang penduduknya sebagian besar bekerja di bidang pertanian sayuran. Ada sektor pariwisata juga yaitu memetik sendiri stoberi. Ada industri rajutan, dan hasil olahan makanan seperti kripik susu, kripik singkong, dan lain-lain.

Di Desa Cibogo terdapat Kampung KB, yang ditunjukkan dengan adanya Gapura/ Tugu Kampung KB dan dengan adanya Balai Sawala yang biasa digunakan untuk tempat penyuluhan, Posyandu, Posbindu, dan Rapat Warga. Identitas itu hanya bersifat fisik, namun yang lebih diutamakan adalah adanya gerakan program lintas sektoral yang didorong oleh peran aktif masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

Sarana dan prasarana komunikasi di Desa Cibogo sudah cukup tersedia, masyarakat telah menggunakan sarana telepon pintar yang biasa di sebut Hand Phone (HP). Infrastruktur internet di kantor desa sudah terhubung dengan adanya *command centre*. Masyarakat bisa memanfaatkan internet secara gratis di kantor Desa Cibogo.

Sekarang jalan-jalan di sepanjang Desa Cibogo sudah mulus. Jalan utama dibangun dengan dana kabupaten berupa kontruksi beton. Sedang jalan-jalan dusun berupa kontruksi semen, berasal dari dana desa yang besarnya pada tahun 2017 sekitar 1,7 milyar rupiah. Listrik sudah lama masuk desa, dan keunikan lain dari Desa Cibogo ini adalah penduduk sudah dapat menikmati internet secara gratis. Sekolah-sekolah yang ada di Desa Cibogo juga sudah memanfaatkan internet sebagai sumber pembelajaran berbasis IT, dan mengembangkan literasi digital. Wajar jika Desa Cibogo pernah meraih juara III se Jawa Barat, sebagai desa maju, berkat program internet masuk desa. Layanan Publik *Online* Sudah berjalan, namun belum sepenuhnya dilaksanakan masih menggunakan layanan secara *offline* (wawancara dengan Ketua FKPPi, 2019).

Layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Cibogo Kec. Lembang sudah baik, terutama yang terkait pengurusan administrasi kependudukan. Sementara layanan publik *online* yang diselenggarakan oleh Desa Cibogo diantaranya dengan telah dibuatnya aplikasi kependudukan, dimana desa tinggal memverifikasi saja. Begitu pula di desa ini sudah lama memberikan informasi dan komunikasi melalui website desa

(wawancara dengan tokoh masyarakat dari unsur ASN, 2019).

PENELITIAN TERDAHULU

1. Henri Subiakto, (2013). INTERNET UNTUK PEDESAAN DAN PEMANFAATANNYA BAGI MASYARAKAT.

Studi ini memfokuskan pada bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu digunakan oleh masyarakat pedesaan. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena penggunaan internet di pelosok pedesaan Jawa Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya digital divide pada masyarakat pengguna TIK. Laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan pengguna perempuan. Selain itu, usia pengguna internet dan inovasi program juga lebih banyak digunakan anak usia sekolah dan kalangan muda. Program internet masuk desa telah membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat dan menjadi sarana belajar mengenal internet. Namun, pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan

informatika ini belum maksimal (Subiakto, 2013).

2. Itsna Hidayatul Khusna, (2019). STRATEGI PEMBERDAYAAN DESA MELALUI PEMANFAATAN TIK DI KABUPATEN PEMALANG. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan bisa merobohkan tiga hambatan yaitu hambatan ke pengetahuan, hambatan ke partisipasi dan hambatan ke peluang ekonomi. Penelitian ini menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana pemanfaatan TIK untuk pemberdayaan desa di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Setelah dilakukan penelitian, hasil yang ditemukan melalui wawancara dan telaah dokumentasi melalui *website*, pemberdayaan desa melalui TIK yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang yaitu: (1) Pemerintah Kabupaten Pemalang membentuk PUSPINDES (Pusat Pemberdayaan Informatika Perdesaan), (2) membuat website desa, (3) Sidekem (Sistem Informasi Desa dan Kawasan Pemalang). Melalui layanan website tersebut

masyarakat Kabupaten Pemalang bisa mendapatkan segala informasi dan mendapatkan layanan publik di wilayah Pemalang (Hidayatul, 2019).

3. Bambang Warsita (2006). KECENDERUNGAN GLOBAL DAN REGIONAL DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI UNTUK PENDIDIKAN.

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan sekarang ini sudah menjadi keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Beberapa contoh pemanfaatan TIK untuk pendidikan dalam perspektif global, regional dan nasional antara lain: (1) ASEAN SchoolNet, (2) EdukasNet, (3) Global Distance EducationNet (GDNNet), dan sebagainya. Pendidikan dewasa ini dan masa mendatang ditandai dengan berbagai kecenderungan yang terkait dengan globalisasi, internasionalisasi dan transnasionalisasi pendidikan, yaitu berkenaan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, tekanan perkembangan ekonomi, persoalan pemerataan dan perluasan akses

serta tantangan untuk meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, dan komitmen global dalam pendidikan. Kecenderungan global dan regional dalam pemanfaatan TIK untuk pendidikan masa depan akan lebih bersifat jaringan, terbuka dan dua arah, beragam, multidisipliner, serta terkait dengan produktifitas kerja dan kompetitif.

LANDASAN KONSEP

Pengertian Pemanfaatan

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna atau bisa diartikan berfaedah. Pemanfaatan memiliki makna proses, cara atau perbuatan memanfaatkan (Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, 2002 : 928). Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan (Poerwadarminto , 2002 : 125).

Pemanfaatan media ialah penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar. Proses pemanfaatan media merupakan proses pengambilan keputusan

berdasarkan pada spesifikasi desain pembelajaran. Misalnya, bagaimana suatu film diperkenalkan atau ditindaklanjuti dan dipolakan sesuai dengan bentuk belajar yang diinginkan. Prinsip-prinsip pemanfaatan juga dikaitkan dengan karakteristik pebelajar. Seseorang yang belajar mungkin memerlukan bantuan keterampilan visual atau verbal agar dapat menarik keuntungan dari praktek atau sumber belajar (Yusufhadi, 2004).

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini merupakan turunan kata dari kata 'manfaat', yakni suatu penghadapan yang semata-mata menunjukkan kegiatan menerima. Penghadapan tersebut pada umumnya mengarah pada perolehan atau pemakaian yang hal-hal yang berguna baik di pergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat.

Internet

Sejauh ini kita belum melihat banyak teori baru yang dikembangkan dengan Internet dan Word wide web. Banyak riset pada komunikasi Cyber telah dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik, terutama tentang 5 efek dan manfaat media baru. Konsep ini dari interaktivitas, *hypertexts*, dan multimedia juga telah menjadi fokus berbagai penelitian. Satu teori yang telah

dikembangkan adalah pemikiran Roger Fidler (1997) tentang mediamorfosis, yang berusaha menjelaskan hubungan antara media baru dengan media lama. Roger Fidler telah mempresentasikan tentang gagasan mediamorfosis untuk membantu kita memahami jenis perubahan di bidang media ini. Dia mendefinisikan mediamorfosis sebagai "perubahan bentuk media komunikasi, biasanya disebabkan oleh interaksi kompleks dari kebutuhan-kebutuhan penting, tekanan-tekanan kompetitif dan politis, dan inovasi-inovasi sosial dan teknologis" dalam (Severin & Tankard, 2007).

Sementara internet dalam konteks media baru. memiliki definisi yang meliputi : 1) Jaringan infrastruktur teknologi yang saling terhubung untuk mendukung *World Wide Web*; 2) Situs-situs resmi yang terhubung dalam web; 3) Arsitektur dan *software* baik yang bersumber terbuka maupun tertutup. Seperti Firefox, Internet Explorer, Google. 4) Komputer dan bahasa sehari-hari yang membuat internet dapat diakses oleh orang dari berbagai budaya dan literasi; 5) *Email, chat instant messaging* (AOL, MSN); 6) Blog dan situs jejaring sosial; 7) *Games, Komunitas. Lingkungan dan Dunia*; 8) Berbagai cara komunikasi yang dimediasi secara digital yang telah meluas dalam

kehidupan sehari-hari (Green, 2010 dalam Mujiyanto, 2012).

Data yang dikeluarkan Nielsen (2018) menyebutkan bahwa jumlah penonton televisi yang mengakses internet mencapai 42 persen, sementara pembaca media cetak yang mengakses internet mencapai 71 persen. Internet, lambat laun, tidak hanya sekadar sebagai media alternatif tetapi menjadi media arus utama sumber informasi bagi warga Indonesia. Kemajuan TIK yang merubah pola produksi, distribusi, dan komunikasi informasi turut mempengaruhi efektivitas penyampaian capaian pemerintah khususnya melalui media sosial. Berita bohong atau *hoax* mudah *viral* dibandingkan dengan berita yang disusun oleh lembaga pemerintah. Mastel dan APJII, sebagai asosiasi pemerhati perkembangan internet, menyepakati bahwa literasi digital masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mudah termakan berita palsu atau *hoax* (Jamaludin, 2017).

Dengan demikian internet merupakan media baru dan salah satu media alternatif, tetapi menjadi media arus utama sumber informasi bagi warga masyarakat Indonesia terutama setelah boomingnya media sosial.

Desa dan Pemerintah Desa

Yang dimaksud dengan desa adalah:

1. desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 tahun 2014).

Sebagian besar masyarakat Indonesia hidup pada daerah perdesaan dan bermata pencaharian sebagai petani/agraris yang mana secara struktural dan administrasi memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan suatu negara. Mata pencaharian penduduk di desa sangat dipengaruhi oleh keadaan alam dan jika dilihat dari kondisi alam, desa dapat dikategorikan sebagai desa nelayan, desa petani, desa perkebunan, desa industri, dan lain-lain. Masyarakat desa sendiri dapat dikatakan sebagai masyarakat yg penduduknya memunyai mata pencaharian utama di sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu (KBBI *Online*, 2015).

Dalam penataan desa seperti dalam pasal 7 ayat 1 butir c, disebutkan bahwa penataan sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut bertujuan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelayanan publik dimaksud seperti peningkatan pelayanan pembuatan KTP bisa sehari selesai. Melayani pembuatan pengantar akte kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian, pembuatan Akta Jual Beli tanah, surat pindah, surat domisili dan lainnya.

Pelayanan Publik

Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public service*) atau pelayanan umum. Rasyid (1998) menyatakan bahwa pemerintahan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, seluruh aktivitas birokrasi pemerintahan dalam tingkatan apapun semata mata ditujukan untuk memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat.

Pelayanan informasi publik merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Perubahan paradigma

pemerintahan yang telah mengalami pergeseran dari “*rule government*” menjadi “*good governance*” menuntut adanya pelibatan seluruh elemen birokrasi, swasta maupun masyarakat dalam keseluruhan proses dan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publik. Sebagaimana dikemukakan Osborne dan Gaebler (1993) bahwa: “*The job of government is to steer not to row the boat. Delivering services is rowing*”.

Berdasarkan konsep tersebut, penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bertumpu pada kewenangan pemerintah semata dan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah sebagai pengarah yang menempatkan masyarakat sebagai pelanggan yang harus dilayani. Kualitas pelayanan akan sangat ditentukan dari kemampuan aparatur dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk itu, masyarakat hendaknya diikutsertakan dalam proses menghasilkan barang barang/kebutuhan maupun pelayanan publik (*public goods and services*) dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan (*empowering rather than serving*).

Dengan konsep tersebut jelaslah bahwa pemerintah berkewajiban untuk

memperjuangkan dan melindungi kepentingan publik dengan menerapkan kebijakan-kebijakan yang tidak merugikan dan dalam prakteknya menghindari pemborosan serta mencegah adanya berbagai tindakan pelanggaran hukum/aturan pelaksanaannya.

Senada dengan konsep diatas, berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Rasyid (1998) menjelaskan bahwa: dilihat dari sisi pemerintah, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak-hak dasar dan hak pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik serta mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik.

Dengan demikian, pemerintah daerah dalam konteks pelayanan informasi publik merupakan ujung tombak terdepan yang langsung berhadapan dan bertanggungjawab pada pemenuhan

kebutuhan masyarakat akan informasi. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah daerah dituntut kemampuannya untuk dapat merespon dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Konsepsi Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok dan dilakukan secara universal. Ndraha (1999), memberikan definisi dan cakupan pelayanan sebagai berikut:

Pelayanan (*service*) meliputi jasa dan pelayanan. Jasa adalah komoditi sedangkan layanan pemerintah kepada masyarakat terkait dengan suatu hak dan lepas dari persoalan apakah pemegang hak itu dibebani suatu kewajiban atau tidak. Dalam hubungan ini dikenal adanya hak bawaan (sebagai manusia) dan hak pemberian. Hak bawaan selalu bersifat individual dan pribadi sedangkan hak pemberian meliputi hak sosial politik dan hak individual. Lembaga yang berkewajiban memenuhi hak tersebut adalah pemerintah. Kegiatan pemerintah untuk memenuhi hak bawaan dan hak pemberian ini disebut sebagai pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Lahirnya era keterbukaan informasi di Indonesia telah mengubah paradigma pelayanan Badan Publik, terutama dalam hal membuka akses informasi kepada publik. Perubahan paradigma tersebut merupakan catatan yang sangat penting dalam perkembangan sejarah keterbukaan informasi publik di Indonesia

Senada dengan konsep diatas, berkaitan dengan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (publik), Rasyid (1998) menjelaskan bahwa: Dilihat dari sisi pemerintah, maka pelayanan adalah proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak hak dasar dan hak pemberian yang wujudnya dapat berupa jasa layanan. Bagi pemerintah, masalah pelayanan menjadi semakin menarik untuk dibicarakan karena menyangkut salah satu dari tiga fungsi hakiki pemerintah disamping fungsi pemberdayaan dan pembangunan. Berkenaan dengan hal tersebut, tugas pelayanan lebih menekankan pada mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik serta mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kualitatif, adalah

penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret dan kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studinya (Sutopo, 2002). Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan metode wawancara mendalam dengan menggunakan daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman peneliti, yakni proses memperoleh keterangan atau informasi untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka langsung dengan informan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk mengetahui makna yang terkandung dalam isi program prioritas pembangunan nasional (Neuman, 2008).

Adapun pengertian lainnya penelitian kualitatif dilakukan untuk menemukan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang objek yang diteliti, dengan berangkat dari suatu fenomena yang ada, penelitian ini juga tidak berangkat dari suatu teori yang hendak diuji kebenarannya, seperti dikatakan Alwasilah (2005) bahwa: "Penelitian kualitatif tidak berangkat dari teori, tapi berangkat dari kasus atau pengamatan".

Objek penelitian dalam penelitian ini proses kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat berkenaan dengan hak hak dasar dan hak pemberian yang wujudnya

dapat berupa jasa layanan pemberian informasi yang bisa diakses melalui internet di bale desa secara gratis. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian Kepala Desa atau Sekretaris desa, UMKM, Komunitas Masyarakat (Karang Taruna), Tokoh Masyarakat (Ketua FKPPi), Kelompok Tani, dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam memilih informan ditentukan secara purposif, dan terpilih 6 informan termasuk Sekretaris desa mewakili Kepala Desa; dengan pertimbangan mereka bisa mewakili masyarakat yang tinggal di desa tersebut dengan usia 17 tahun ke atas atau yang telah mempunyai KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan berpendidikan. Hal ini perlu dengan pertimbangan, dianggap dapat menjawab pertanyaan penelitian.

PEMBAHASAN

Identitas informan

Tabel 1. Identitas informan

No	Nama	Jabatan
1.	Abdul Syukur	Sekretaris desa
2	Tatang Sunarya	Kelompok Tani
3	Ian Sopian	ketua (FKPPI)
4.	Ir. Ahmad Utama	Komunitas Masyarakat dari
5.	Deni Kurniawan.	Aparatur Sipil Negara (ASN)
6.	Andi Supriadi Jaya	Komunitas Masyarakat dari Karang Taruna UMKM/Kelompok Usaha

Sumber: Hasil penelitian 2019.

Melihat tabel di atas dapat dikemukakan bahwa yang menjadi informan adalah orang-orang yang bisa mewakili masyarakat Desa Cibogo Kecamatan Lembang. Ini terlihat dari jabatan mereka ada Sekretaris desa, Kelompok Tani, Ketua (FKPPI), Komunitas Masyarakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Komunitas Masyarakat Karang Taruna, dan dari UMKM/Kelompok Usaha Desa Cibogo. Sementara nomor HP ada yang memberitahukan dan ada yang tidak mau diekpos.

Ketersediaan perangkat internet di kantor desa

Mayoritas penduduk di Desa Cibogo di bidang pertanian (sayur mayur dan wisata), pemerintan di desa sangat berkeinginan untuk bisa memasarkan hasil-hasilnya melalui TIK kepada konsumen (terutama pada masyarakat di Bandung dan Jakarta) secara cepat dan murah, karena produknya rentan kadaluarsa (busuk dll.) diperlukan kecepatan dalam pemasarannya. Oleh karena itu sangat diperlukan internet gratis di desa ini.

Infrastruktur internet saat ini di kantor desa sudah terhubung. Hal ini terlihat di depan kantor desa sudah ada semacam *command centre*, berupa alat pemancar sinyal komunikasi sehingga

ancaman *blank spot* dapat teratasi. Ketersediaan akses internet (bandwidth): di setiap OPD sudah memiliki akses internet. Sudah tersedia internet gratis di 13 RW yang ada di Desa Cibogo, masyarakat bebas menggunakannya.

Kapasitas jaringan: Ketersediaan jaringan komputer: UTP, *coaxial*, *fiber*, *wireless*.

Ketersediaan perangkat keras dan lunak : perangkat keras seperti laptop dan komputer desktop sudah terpenuhi, masing2 pegawai 1 perangkat dan untuk perangkat lunak di dalam komputer menggunakan MSW.

Desa Cibogo sudah mempunyai 'web', masing-masing desa sudah menggunakan domain sideka.id; email, desa diarahkan untuk menggunakan email resmi pemerintah; sudah semua desa menggunakan telepon/mobile phone/smart phone (mobile internet), sms, medsos, instan messaging. Penggunaannya masyarakat dalam mengakses internet di setiap RW (sekitar aula) secara optimal dimanfaatkan masyarakat dengan berbagai motif dan kebutuhan yang variatif.

Jaringan antar desa sudah terhubung bahkan dengan seluruh RW yang ada . Dari jaringan yang berkapasitas bandwidth yang ada yaitu 100 Mega, desa telah menyalurkan ke setiap RW sebesar 13 mega sebagai pelayan masyarakat dalam

mengakses internet (penyediaan jaringan wi fi). Pemeliharaan khusus seperti hardware, software, telekomunikasi, fasilitas pendukung. Pemeliharaan dilakukan oleh Desa Cibogo dibantu dari unsur masyarakat.

Di tingkat desa, bersama Kepala Desa dan jajarannya baru sebatas memberi pemahaman dan support (via "Sapa Warga") kepada warganya tentang pentingnya teknologi informasi dan komunikasi (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

SDM aparat desa dalam penguasaan internet

Kondisi sumber daya manusia Desa Cibogo di bidang TIK tergolong cukup baik, hampir 80% masyarakat bisa memanfaatkan gadget 4G atau smartphone, dan sebagian kecil saja yang masih menggunakan 2G. Adapun untuk pelatihan TIK bagi aparat desa belum dilaksanakan; umumnya pegawai desa bisa memanfaatkan TIK secara otodidak, dan hanya beberapa orang saja yang pernah diklat TIK. Walau demikian aparat di Desa Cibogo mampu menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi di bidang TIK (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

Meskipun aparat desa kebanyakan menguasai TIK secara otodidak, namun

mereka sanggup melaksanakan tugasnya dengan semangat dan mampu menggunakan TIK untuk memperlancar tugasnya. Sementara ada beberapa orang aparat yang telah mengikuti diklat TIK secara memadai, sehingga mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

Kesiapan Desa Cibogo baik dari aspek literasi masyarakat ataupun jaringan TIK, Desa Cibogo termasuk dalam satu desa yang paling siap dibanding dengan desa lainnya di Kecamatan Lembang, bahkan jaringan internetnya sudah di backup oleh antena pemancar yang berkekuatan 282,33 khz, sehingga memudahkan dari sinyal yang kurang baik (blankspot).

Layanan publik setelah adanya perangkat internet di kantor desa

a). Dalam struktur organisasi pengelolaan TIK dibanding dengan desa lainnya di Kab. Bandung Barat, Desa Cibogo sudah menerapkannya yakni "Program Sapa Warga" serta program lainnya, seperti program sauyunan antar warga;

b). Tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan publik secara digital, sedangkan fungsinya memberi laporan-laporan pertanggungjawaban, usulan warga, dan pemberian aplikasi kependudukan yang ada.

c). Tugas dan fungsi diantaranya memberikan laporan pertanggungjawaban pembangunan Desa Cibogo ; memberikan pelayanan dan usulan warga ; serta memberikan pelayanan aplikasi sms (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

Pendapat Tokoh masyarakat yang merupakan ketua (FKPPI) Ian Sopian tentang layanan publik/pemerintahan desa saat ini jauh lebih baik dari dibandingkan jaman dulu karena setiap kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan lebih cepat dan lebih baik, tata kelola administrasi desa saat ini lebih dengan menggunakan TIK sehingga pelayanan administrasi pada publik lebih cepat terlayani salah satu contoh adalah pembuatan KTP, KK dan BPJS walaupun baru sebagian dilakukan secara *online* dan masih menggunakan TIK secara *offline*. Sementara pendapatnya tentang Layanan Publik *Online* di Desa Cibogo sudah ada namun belum sepenuhnya dilaksanakan masih menggunakan layanan secara *offline* (wawancara, 2019).

Pendapat dari komunitas masyarakat (Aparat Sipil Negara) Desa Cibogo Kecamatan Lembang yang diwakili oleh Ir. Ahmad Utama, berpendapat tentang layanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintahan Desa Cibogo Kecamatan Lembang sudah baik, terutama yang terkait

pengurusan administrasi kependudukan. Sementara menurutnya layanan publik *online* yang diselenggarakan oleh Desa Cibogo diantaranya dengan telah dibuatnya aplikasi kependudukan, dimana desa tinggal memverifikasi saja. Begitu pula di desa ini sudah lama memberikan informasi dan komunikasi melalui website desa, dimana kontennya terkait tentang potensi desa, harapan, keluhan dan lain-lain dari warganya (wawancara, 2019).

Tatang Sunarya dari Kelompok Tani Desa Cibogo Kecamatan Lembang berpendapat tentang layanan pemerintahan desa lebih baik, setiap kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan lebih cepat. Pelayanan publik lebih cepat terlayani salah satu contoh adalah pembuatan KTP bisa satu hari. Namun masih ada pelayanan yang menggunakan secara *offline*. Desa Cibogo juga telah menerapkan pelayanan secara *online*, namun belum sepenuhnya dilaksanakan masih menggunakan layanan secara *offline* juga masyarakat bisa menikmati wifi/internet secara gratis. Cara desa memajukan daerahnya yaitu dengan promosi potensi desa melalui dukungan TIK karena dengan adanya teknologi informasi, bisnis bisa lebih mudah, murah dan cepat.

Kesiapan Desa Cibogo Kecamatan Lembang, saya rasa sudah cukup siap untuk

menyambut program desa digital karena masyarakat sudah mulai melek IT dan dengan didukung oleh infrastruktur (telekomunikasi dan internet) yang cukup memadai (wawancara, 2019).

Sementara metode edukasi/sosialisasi dan daya tarik desa, ada beberapa pendapat dari informan antara lain:

1. Setelah ada pemberian Smartphone kepada 13 RW dan kepala desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2019. Maka edukasi/sosialisasi dilaksanakan kepada ketua RW dulu, baru ke masyarakat.
2. Metode edukasi/Sosialisasi yaitu dengan mengundang nara sumber yang andal untuk memberikan pelatihan khususnya TIK pada masyarakat dan dilakukan di pertemuan-pertemuan yang dilakukan di tingkat RW/RT, misal pada saat arisan ibu PKK, kegiatan karang taruna atau di balai desa. Pemerintah Desa Cibogo Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, pada hari Selasa 1 Oktober 2019 telah melaksanakan kegiatan Serah Terima Smartphone kepada para ketua RW di Wilayah Desa Cibogo sebanyak 13 RW dan 1 perangkat desa. Smartphone tersebut merupakan bantuan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Banprop) tahun anggaran 2019. Tujuan bantuan tersebut untuk meningkatkan informasi dan transparansi publik.

3. Metode sosialisasi penggunaan TIK di Desa Cibogo yang tepat adalah dengan memanfaatkan media sosial di lingkungan RW, RT, Desa, bahkan pihak lainnya (via wa grup), disamping dengan door to door ke setiap warga.
4. Metode sosialisasi penggunaan TIK di Desa Cibogo yang sesuai adalah dengan datang langsung ke warga (*face to face*) dan dikumpulkan di balai warga, selain itu diberikan handphone kepada setiap ketua RW sebagai alat komunikasi antara pemerintah desa dengan ketua rukun warga sehingga penyampaian pesan dapat dilakukan lebih baik dan lebih cepat tidak terbatas oleh jarak tempuh ataupun waktu bisa kapan saja pesan itu tersampaikan. Media komunikasi yang digunakan adalah handphone melalui pesan singkat SMS ataupun WhatsApp ataupun via telephone genggam (wawancara, Ian Sopian, 2019).
5. Daya Tarik Desa Cibogo merupakan desa yang penduduknya sebagian besar bekerja di bidang

pertanian sayuran. Ada sektor pariwisata juga yaitu memetik sendiri stroberi. Ada industri rajutan, dan hasil olahan makanan seperti kripik susu, kripik singkong dll.

6. Daya tarik desa Cibogo selain sebagai sentra pertanian dan sayuran, juga sebagai destinasi wisata. Disana dekat dengan objek gunung Tangkuban Parahunya, daerah *outbond* dengan berbagai akomodasi hotelnya yang menarik.

Konsep Desa Digital, berarti masyarakat mudah mendapatkan pelayanan dan murah serta cepat, masyarakat yang lokasinya jauh dari desa tidak harus datang ke desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Program desa digital tentunya harus segera diimplementasikan oleh desa, yakni dengan berkolaborasi dengan pihak stakeholder (termasuk dengan pihak Balitsa Lembang tempat saya bekerja) dan pihak ketiga lainnya. dengan konsep desa digital diharap potensi ekonomi masyarakat (petani dan sayuran) dapat meningkat, baik pendapatan ataupun produktivitasnya.

Ian Sopian berpendapat potensi desa Cibogo, salah satunya adalah Rawa Cilalay yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata pemancingan dan wisata rawa. Potensi ikan bogo yang luar biasa di

Desa Cibogo dan desa-desa yang tidak jauh dari rawa Cilalay, bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi sentra desa ikan bogo beserta industri pengolahan dengan bahan baku ikan bogo. Ikan ini juga dapat diasinkan. Seluruh potensi yang ada di Desa Cibogo Kecamatan Lembang bisa didorong dengan TIK karena TIK adalah tools untuk membantu objek yang lainnya mengoptimalkan potensinya.

Mengenai pendanaan desa tercapai dari hasil swadaya dan partisipasi masyarakat dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat di Desa Cibogo berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang, contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan. Di samping itu sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat (Wawancara dengan Sekretaris desa, 2019).

PENUTUP

Simpulan

Layanan publik di desa ini sudah bagus, setiap kepentingan masyarakat bisa dilayani dengan cepat. Pelayanan publik saat ini lebih cepat terlayani salah satu contoh adalah pembuatan KTP bisa 1 hari.

Masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang selama ini berlangsung. Desa Cibogo sudah menerapkan pelayanan secara *online*, namun belum sepenuhnya dilaksanakan masih menggunakan layanan secara offline juga masyarakat bisa menikmati wifi/internet secara gratis.

Promosi potensi desa bisa dilakukan melalui dukungan TIK karena dengan adanya teknologi maka potensi desa baik merupakan daerah wisata atau penghasil bumi seperti sayuran dan buah-buahan dan bisnis bisa lebih mudah dan murah, karena bisa dilakukan secara *online*.

Sosialisasi penggunaan TIK di Desa Cibogo melalui *handphone*, yaitu setiap ketua RW di bagi HP sebagai alat komunikasi antara pemerintah desa dengan ketua rukun warga sehingga penyampaian pesan dapat dilakukan lebih baik dan lebih cepat. Setelah ada pemberian *Smartphone* kepada 13 RW dan kepala desa dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat 2019. Maka edukasi/sosialisasi dilaksanakan kepada ketua RW dulu, baru ke masyarakat secara bertahap.

Saran

TIK atau internet desa diharapkan dapat memberikan layanan publik sebaik-baiknya, yakni dengan memanfaatkan teknologi informasi ini secara murah serta

cepat, bahkan gratis; masyarakat tidak harus datang ke desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Tinggal klik aja sudah bisa menikmati layanan desa. Begitu pula masyarakat dapat memanfaatkan teknologi ini bagi meningkatkan taraf kehidupan ekonominya, seperti dalam hal pemasaran hasil produk pertanian, kerajinan atau di bidang pariwisatanya.

Pelayanan umum yang diselenggarakan oleh organisasi pemerintahan selayaknya dapat memenuhi kualitas standar mutu (kualitas) yang dapat memuaskan kepentingan masyarakat. Penilaian tentang baik atau buruknya pelayanan yang diberikan oleh organisasi pemerintahan dapat dilakukan dengan membandingkan pelayanan yang diharapkan dengan kinerja aktual yang dihasilkan organisasi yang bersangkutan. Kualitas pelayanan akan sangat ditentukan dari kemampuan aparatur dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk itu, masyarakat hendaknya diikutsertakan dalam proses memenuhi kebutuhan desa maupun pelayanan publik dengan mengembangkan pola kemitraan dan kebersamaan.

Aparat desa, diharapkan mampu meningkatkan kemampuan akan TIK nya; selama ini hanya aparat tertentu saja yang

menguasai TIK secara memadai. Diharapkan adanya pelatihan khusus mengenai TIK kepada masyarakat, agar Sumber Daya Manusia Desa Cibogo melek internet sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwasilah, A. Chaedar. 2005. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Jaya.
- Anonim. (2020). *Ciri Khas Masyarakat Desa Yang Harus Difahami Perangkat*. Tersedia dalam <<https://www.pedekik.com/ciri-khas-masyarakat-desa-yang-harus-difahami-perangkat/>> diakses tanggal 29 Januari 2020.
- Fuadi, Riksa Rifki.(2019).*Membangun Smart Village*. Kabupaten Bandung Barat: Diskominfotik KBB.
- Green, Leila. (2010). *The Internet : An Introduction to the New Media*. English edition First published in 2010 by Berg, Oxfordd New York, USA.
- Hidayatul , Itsna, Khusna. (2019). *Strategi Pemberdayaan Desa Melalui Pemanfaatan Tik Di Kabupaten Pemalang*. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 2, Desember 2019: 76-89. Jurnal Kominfo.go.id>jpkop>download-PDF. 18/6/2020.
- J. Severin, Werner – W. Tankard, James, Jr. (2007). *Teori Komunikasi, (Sejarah, Metode, dan Terapan di Dalam Media Massa)*. Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- Jamaludin, F. (2017). *Rendahnya literasi digital jadi penyebab penyebaran berita hoax*. Available at: <https://www.merdeka.com/teknologi/rendahnya-literasi-digital-jadi-penyebab-penyebaran-berita-hoax.html> (Accessed: 19 February 2019).
- Mudjiyanto, Bambang, (2012). *Literasi Internet dan partisipasi MasyarakatPemilih dalam Aldifitas Pemanfaatan Media Baru*, (Survey Masyarakat Pemilih Pilkada, Kasus Masyarakat Kota Bengkulu), Jurnal Studi Komunikasi Dan Media, Vol. 16 No. I (Januari - Juni 2012).
- Ndraha, Talidziduhu. (1999). *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Neuman, W. Lawrence. (2008). *Basics of Social Research. Qualitative and Quantitative Aproches*. New York. Pearson Edition.
- Osborne, David and Ted Gaebler. (1993). *Reinventing Government : How The Entrepreneurial Spirit Is Transforming The Public Sector*, New York : Plume Penguin Publish Group.
- Peter Salim, Yenny Salim. (2002). *Kamus bahasa Indonesia kontemporer*.
- Rasyid, Ryaas. (1998). *Desentralisasi Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi di Indonesia*, Jakarta : PT. Pustaka LP3ES.
- Subiakto, Henri. (2013). *Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 26, No. 4, tahun 2013, hal. 243-256. <http://journal.unair.ac.id/download->

- [fullpapers-mkpa4d7ec1aaefull.pdf](#),
18/6/20
- Sumiaty, Noneng. Sumiati, Neti (2014). Literasi Internet pada Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Penelitian Komunikasi*. Bandung: BPPKI. Vol. 17 No. 1. Juli. Hal. 77 – 88.
- Syaidah, at all. (2019). Hasil Wawancara, *Kesiapan Desa di Kabupaten Bandung Barat menuju desa digital*, BPSDMP Bandung Kementerian Kominfo RI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Tersedia dalam https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2014_6.pdf, diakses tanggal 13/2/2020
- KBBI Online. (2015). *Definisi Masyarakat Desa*. Tersedia dalam <http://kamusbahasaIndonesia.org/masyarakat%20desa/mirip> KamusBahasaIndonesia.org, diakses tanggal 25 Februari 2019.
- Kominfo.go.id. (2020), https://www.kominfo.go.id/content/detail/17952/luncurkan-desa-digital-menkominfo-semua-harus-bisa-rasakan-internet/0/berita_satker...., diakses tanggal 28 Januari 2020.
- Warsita Bambang (2006).
[file:///C:/Users/HP_Elitepad/Downloads/394-961-1-SM%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/HP_Elitepad/Downloads/394-961-1-SM%20(3).pdf).
 No.
 19/X/TEKNODIK/DESEMBER/2006- pdf 2018, diakses tanggal 30 Juni 2020.
- Wikipedia, (2020). *Cibogo, Lembang, Bandung Barat*. Tersedia dalam , <https://id.wikipedia.org/wiki/Cibog>
- [o, Lembang, Bandung Barat](#), diakses tanggal 28 Januari 2020.
- W.J.S. Poerwadarminta. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Balai Pustaka. Jakarta. Tersedia dalam https://www.goodreads.com/author/show/1000111.w_j_s_poerwadarminta. Diakses tanggal 30 Juni 2020.
- Yusufhadi Miarso (2004), “*Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*”, Jakarta: Prenada Media.